

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Al-Mawardi. "Al-Ahkam as-Sulthaniyyah." Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, n.d.
- Approach, Developmental. "COMPARATIVE," 1966, 75.
- Asshiddiqi, Muhammad Agung. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Perspektif Siyāsah Dustūriyah*, 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh" 8 (n.d.): 117–18.
- Azizah, Ulvia Nur. "Apa Itu Retret Kepala Daerah Terpilih 2025 Yang Dilakukan Di Magelang?" detikjateng, 2025.
- Bagir, Manan. "Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art6>.
- Carl, J.Friedrich. "Partai Politik." *Unpatti.Ac.Id*, 2019, 1–34.
- Denhardt, Robert B, Janet V Denhardt, and Maria P Aristigueta. *Managing Human Behavior in Public and Nonprofit Organizations*. 3rd ed. SAGE Publications, 2013.
- Fadly, Muhammad, Syahwala Harahap, and Rahmad Efendi Rangkuti. "Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Muhammad Fadly Syahwala Harahap 1) , Rahmad Efendi Rangkuti 2) 1,2" 6 (2025).
- Feilin C. P. Kaparang. "Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Ketua Partai Politik Di Indonesia" 12, no. 5 (2024).
- Fikhriyah, Roidatul. "Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara Dan Kepemimpinan Dalam Islam Periode Klasik." *Al-Mawardi's Perspective On The Concept Of State And Leadership In Islam During The Classical Period* 6, no. 2 (2025): 1–17.
- . "Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara Dan Kepemimpinan Dalam Islam Periode Klasik Al-Mawardi's Perspective On The Concept Of State And Leadership In Islam During The Classical Period" 6, no. 2 (2025): 1–17.
- Fikri, M. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Kebijakan Publik Di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 33–50.

- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Friedrich, Carl Joachim. "Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America (Revised Ed.)," 1950.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 2015.
- Hasibuan, Baginda Kharayan. "Tinjauan Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokratis Indonesia," n.d.
- Helen, Zennis, and Fitra Mulyawan. "Reformasi Regulasi Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia Untuk Pemilu Yang Demokratis" 01, no. 06 (2023): 62–70.
- Hidayat, R. "Kaidah 'tasarruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'yyah Manuthun Bi Al-Maslahah' Dalam Hukum Tata Negara Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 120–38.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: UIN Alauddin Press, 2020.
- Ilyas, Muhammad, and Nur Rahmah. "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Siyasah : Urgensi , Ketaatan Dan Kriteria Pemimpin" 1 (2025): 1–11.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- . "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik," 2011.
- . "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstual: Doktrin Dan Politik Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, n.d.
- Irfan, Fachruddin. "Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024): 4. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.401>.
- Janssens, Uwe. "Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia," 2024. <https://doi.org/10.1007/s00063-024-01190-4>.

- Jeff Dyer, Hal Gregersen, dan Clayton Christensen. "The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators." *Creative Arts Therapy Careers: Succeeding as a Creative Professional*, 2021, 56. <https://doi.org/10.4324/9781003352563-1>.
- Kamizi, Fajar. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasa Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia" VOL 3 NO 1 (2022): 17–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109>.
- Kiefer, Ruth Ann. *Leading Change. Rehabilitation Nursing*. Vol. 35, 2010. <https://doi.org/10.1002/j.2048-7940.2010.tb00029.x>.
- M. Anwar Rachman. "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik" Volume 31 (2016): 189–219. <https://doi.org/DOI:10.20473/ydk.v31i2.4828>.
- Manan, Bagir. "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945" 2 (2015): 626–43.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Buku Ajar Metodologi Penelitian. Cv Science Techno Direct*, 2024.
- McKean, Dayton D., and Sigmund Neumann. *Modern Political Parties: Approaches to Comparative Politics. The Western Political Quarterly*. Vol. 10, 1957. <https://doi.org/10.2307/444269>.
- "Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tidak Ikut Retret Di Akmil." 5 Juni 2025, 2025. <https://kl.antaranews.com/berita/30305/megawati-instruksikan-kepala-daerah-pdip-tidak-ikut-retret-di-akmil>.
- Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Educacao e Sociedade*. Vol. 1, 2008.
- Moki, Indra Setiawan. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK BERDASARKAN PRINSIP PRINSIP/ASAS-ASAS NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA" 15, no. 1 (2025).
- Muhammad, Iqbal. "Pengertian Politik Islam Dan Bidang Kajiannya." *Suara Muslim*, 2025.
- Muhammad Jaidi. "KEDUDUKAN SIYASAH DUSTURIYYAH STUDI KASUS POLITISASI PEMILU 2024 ANALISIS PERADILAN HUKUM ISLAM," 2024, 662–83.
- Mukti Pratama, Surya, and Hario Danang Pambudhi. "Kedudukan, Fungsi, Dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah Dalam Kerangka Sistem

- Otonomi Daerah.” *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (2021): 120–30.
- Nurdin, Nurliah, Yudi Rusfiana, and Prio Teguh. “Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bandung Tahun 2020” 8090 (2025): 130–45. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i1.39660>.
- Pamuji, Kadar. “BUKU AJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Disusun Oleh :,” 2023.
- Philipus, M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2002.
- Pratiwi, Laviva. “Partai Politik Memiliki Peran Strategis Dalam Mewujudkan.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2025).
- Presiden R.I. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011,” no. 2 (2011).
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, n.d.
- Pulungan, Suyuthi S. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Ramadhan, Rizky. “Intervensi Partai Politik Terhadap Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” 2022.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara*, 2023.
- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia” 1, no. 1 (2021).
- Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, and Nuril Khasyi. “Sejarah Politik Hukum Islam Dari Klasik Ke Kontemporer: Pengembangan Dan Transformasi,” 2024, 854–80.
- Rosyidi, Muhammad. “Penerapan Fiqh Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” 2024, 65–76.
- Sajian, Aldi. “Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia” Vol 7 No.2 (2023). <https://doi.org/DOI> <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.1-7>.
- Sartori, Giovanni. “Parties and Party Systems: A Framework for Analysis,” 1976.
- Siringoringo, Martin P. “Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama

Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 03 (2022): 111–24. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>.

Sudrajat, Tatang. “PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIK UNTUK PARTAI POLITIK PADA ERA DEMOKRATISASI: TANTANGAN , PERMASALAHAN DAN PROSPEK,” 2017, hlm.305-256.

Suhadi, S. “Relevansi Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Publik Kontemporer.” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 101–18.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, 2010.

TRIJAYA, A. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Antar Waktu Ketua Dprd Di Kabupaten Magelang,” 2013.

Ulpian. “Dikutip Dalam Hukum Romawi Klasik: Pemikiran Dan Praktek.” *Penerbit Hukum Romawi*, 1995, hlm.42.

Ulul, Rindu, Ilmi Sugianto, and Rizki Mustika Trijayanti. “Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam” 3, no. 1 (2025): 161–76.

Uud. “PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT - PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI SELUAS-” 9, no. 4 (2015): 577–602.

Wali, Al. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi” 1, no. 1 (2023): 90–114.

Yusuf, A. “Kemaslahatan Umat Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 32, no. 1 (2022): 89–104.

Zahrah, A. “Good Governance Dalam Perspektif Siyasah Islam.” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2019): 77–92.

LAMPIRAN

1. Surat Edaran PDIP

Jakarta, *20 Februari* 2025

Nomor : *7284* /IN/DPP/ *II* /2025
 Lampiran : *1*
 Perihal : Instruksi Harian Ketua Umum

Y'th. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan Seluruh Indonesia
 di-
 Tempat masing-masing

Merdeka !!!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

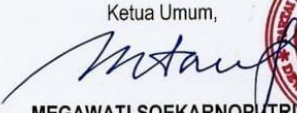
Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.


selanjutnya **DIINSTRUKSIKAN** kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan *stand by commander call*.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 Masa Bakti 2019-2024**

Ketua Umum,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



Tembusan:
 1. Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan;
 2. Arsip.

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 200.5/629/SJ



3. Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Partai Politik berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;



- 7 -

- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Partai Politik berkewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)**

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 889262 Faksimile (0354) 889564 Website: www.uinkedri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mockhammad Ijaz Alfian Maulami¹
NIM 22303050
Fakultas / Program Studi Syariah / Hukum Tata Negara
Judul Instruksi Ketua Umum Partai Terkait
Retret Kepala Daerah Perspektif Hukum
Positif Dan Fikih Siyash Dusturiyah

No Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	TTD
1.	7 November 2025	Bimbingan Proposal	
2.	16 November 2025	Acc Proposal	
3.	16 Desember 2025	Seminar Proposal	
4.	19 Februari 2025	Bimbingan Skripsi	
5.	26 Februari 2025	Acc Dosen	

Kediri 26 Februari 2026

Pembimbing II

Mohammad Fikri Alan M.H
NIP. 199406302020121016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)**

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinikediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mochhammad Ijaz Alfian Maulami'
NIM 22303050
Fakultas / Program Studi Syariah / Hukum Tata Negara
Judul Instruksi Ketua Umum Partai Terkait
Retret Kepala Daerah Perspektif Hukum
Positif Dan Fikih Siyasah Dusturiyah

No Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	TTD
1.	22 September 2025	Bimbingan proposal	
2.	3 Oktober 2025	Bimbingan proposal	
3.	20 Oktober 2025	Bimbingan proposal	
4.	6 November 2025	Bimbingan proposal dan acc proposal	
5.	16 Desember 2025	Seminar Proposal	
6.	5 Januari 2025	Bimbngan skripsi	
7.	2 Februari 2025	Bimbngan skripsi	
8.	9 Februari 2025	Bimbngan skripsi	
9.	19 Februari 2025	ACC dosen	

Kediri 26 Februari 2026

Pembimbing I

Moch. Choirul Rizal, M.H.
NIP. 19901017 201903 1 013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **Mochammad Ijaz Alfani Maulami**, Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Ali Qodam dan Ibu Eni Rahayu. Penulis memiliki satu saudara kandung yang bernama M ijaz Faizil Muhyi . lahir di Tulungagung pada tanggal 20 September 2003. Penulis bertempat tinggal di Dusun Gilang RT/RW 01/01, Desa Plosorejo,

Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Pendidikan formal penulis dimulai di **SDN Plosorejo II** dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di **MTs Arrahmah**, Desa Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di **SMK Arrahmah**, Desa Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di **Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri** dan terdaftar sebagai

mahasiswa aktif pada **Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah**. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.